

Pengaruh Kualitas Hidup, Aktivitas Di Ranah Publik, serta Kemandirian Ekonomi Perempuan Terhadap Tingkat Perceraian

Noer Aenie Yuniar Sari, Aan Julia, Dewi Rahmi.
Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Bandung.
Bandung, Indonesia
e-mail: noeraenie1@gmail.com

Abstract—The role of women in the development of a country is very important, marked by the achievement of the quality of women's equality of rights and position of women in the development. So that it will open up access for women to be active in the public sector and women can generate income that will make women economically independent. The phenomenon of high divorce rates in Indonesia is contributed by three provinces namely West Java, Central Java, and East Java. This study aims to analyze the effect of quality of life, women's activities in the public sphere, as well as women's economic independence on divorce rates in the province of West Java, Central Java, and East Java. The method used in this study is a quantitative method with regression analysis using panel data applying a fixed-effect model. The results obtained in this study are. The effect of the variable of quality of life, activities in the public sphere, and economic independence of women significantly impact the divorce rate in West Java, while the variable of quality of life, activities in the public sphere, as well as the economic independence of women in Central and East Java showed no effect on the divorce rate.

Keywords—Women's Development, Divorce, Women's Economic Independence.

Abstrak—Peran perempuan dalam pembangunan sebuah negara sangat penting, ditandai dengan tercapainya kualitas hidup perempuan yang akan menciptakan kesamaan hak dan kedudukan perempuan dalam sebuah pembangunan. Sehingga akan membuka akses perempuan untuk aktif dalam sektor publik dan perempuan dapat menghasilkan pendapatan yang akan menjadikan perempuan mandiri secara ekonomi. Fenomena tingginya angka perceraian di Indonesia disumbang dari tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas hidup, aktifitas perempuan di ranah publik, serta kemandirian ekonomi perempuan terhadap angka perceraian di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi menggunakan data panel dengan menggunakan model fixed effect (FEM). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu. Pengaruh variabel kualitas hidup, aktivitas di ranah publik, serta kemandirian ekonomi perempuan berpengaruh

signifikan terhadap angka perceraian di Jawa Barat, sedangkan variabel kualitas hidup, aktivitas di ranah publik, serta kemandirian ekonomi perempuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan tidak berpengaruh terhadap angka perceraian.

Kata Kunci—Pembangunan Perempuan, Perceraian, Kemandirian Ekonomi Perempuan.

I. PENDAHULUAN

Posisi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan nasional masih kurang mendapatkan perhatian yang serius, aspek tersebut meliputi bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Padahal apabila dilihat dari jumlah penduduk saat ini separuh penduduk usia kerja di Indonesia adalah perempuan. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja akan meningkatkan produktivitas, efisiensi ekonomi dan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sebagian perempuan yang bekerja, menganggap bahwa peran mereka dalam pembangunan tidak akan optimal apabila mereka tidak bekerja sebab dengan perempuan bekerja ia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, motivasi perempuan yang sudah menikah untuk bekerja menurut (Naibaho & Sihotang, 2011) ialah semata-mata untuk membantu perekonomian keluarga di tengah tidak menentunya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sementara pendapatan rumah tangga yang cenderung tidak meningkat akan mengganggu stabilitas perekonomian rumah tangga. Maka dengan perempuan bekerja dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga tanpa mengesampingkan tugas utamanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Hal senada dikatakan (Dreze & Sen, 1999) bahwasanya ketika perempuan memiliki pendidikan tinggi, mempunyai hak-hak kepemilikan, serta dapat bekerja di luar rumah dan menghasilkan pendapatan maka, akan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Masuknya perempuan ke dalam dunia kerja maka ia berpartisipasi sebagai Angkatan kerja, hal

tersebut menunjukkan bahwa akses perempuan dalam pembangunan sebuah negara semakin terbuka. Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menunjukkan bahwa kualitas hidup perempuan dalam pembangunan semakin setara dengan laki-laki, hal tersebut dapat dilihat dari angka IPG yang hampir mendekati angka 100. Aktifnya perempuan dalam dunia kerja dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang menunjukkan tren meningkat dari tahun 2017-2018, hal tersebut mengindikasikan bahwa perempuan semakin berpartisipasi aktif dalam ranah publik. Kemandirian ekonomi perempuan dapat dilihat dari Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP) yang menunjukkan tren meningkat dari tahun 2017-2018 hal tersebut mengindikasikan bahwa perempuan semakin mandiri maka perempuan dapat berkontribusi dalam menghasilkan pendapatan.

TABEL 1. PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN, 2017-2018

Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP)
2017	90.96	71.74	36.62
2018	90.99	72.10	36.70

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah 2020

Seiring dengan aktifnya perempuan dalam pembangunan, adanya fenomena angka perceraian di Indonesia semakin tinggi, provinsi dengan angka perceraian tertinggi berada di pulau Jawa yaitu Jawa Barat dengan total angka perceraian di tahun 2017 sebesar 79.047 kasus, Jawa Tengah sebesar 69.857 kasus, dan Jawa Timur sebesar 84.839 kasus. Dari total angka perceraian tersebut kasus cerai gugat lebih mendominasi daripada cerai talak. Faktor penyebab perceraian pun beragam diantaranya kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan yang terus menerus terjadi, ekonomi finansial, hingga meninggalkan salah satu pihak. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Sari & dkk, 2016) mengenai risiko perceraian di Kota Bandung, menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga dengan risiko perceraian yang tinggi yaitu komunikasi konteks rendah yang mana pasangan merasa bahwa mereka berbicara dengan orang lain dari cara mereka

berbicara hanya memikirkan perasaan sendiri dan mereka tidak dapat menjalankan peran dan tanggung jawab dalam pernikahan dengan baik, selain itu rendahnya kontribusi pendapatan menjadi penyebab perceraian di Bandung. Karena penghasilan yang rendah menjadi penyebab masalah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sementara sebagian rumah tangga memiliki harapan kehidupan yang lebih baik. Akibatnya rumah tangga memutuskan untuk bercerai.

Hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian bahwasanya apakah semakin baik kualitas hidup perempuan, perempuan aktif di ranah publik serta kemandirian ekonomi perempuan dapat mempengaruhi angka perceraian di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

II. LANDASAN TEORI

A. Teori Ekonomi Sumber Daya Manusia

Menurut (Arfida, 2003) keberhasilan pembangunan suatu negara sangat ditentukan oleh ketersediaan berbagai sumber yang dapat digunakan secara optimal. Sumber daya tersebut meliputi; sumber daya alam, sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar, dan sistem perekonomian. Salah satu sumber yaitu Sumber daya manusia atau *human resources* mengandung dua arti yaitu; Pertama, sumber daya manusia merupakan usaha kerja atau jasa yang diperoleh dalam melakukan proses produksi. Kedua, sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dengan memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu untuk melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila penduduk mampu berpartisipasi dalam pembangunan karena penduduk merupakan objek dan subjek pembangunan. Penduduk sebagai objek pembangunan maka semua orang diharapkan dapat menikmati hasil dari pembangunan secara adil dan merata. Penduduk sebagai subjek pembangunan maka penduduk mampu menghasilkan pencapaian-pencapaian pembangunan yang baik. (Julia, 2018).

B. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan menurut (Hubeis, 2010) upaya yang dilakukan untuk memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, Pemberdayaan perempuan dalam sebuah pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Pembangunan merupakan

suatu perubahan yang berencana dan direncanakan, dengan tujuan mengadakan perubahan terhadap perilaku positif yang akan membawa manfaat bagi orang banyak.

C. Keputusan Perempuan Bekerja

Keputusan seorang perempuan masuk ke dunia kerja Menurut (Simanjuntak, 1985) ditetapkan bukan hanya oleh pribadinya saja akan tetapi secara bersama oleh semua keluarga. Menurut (Artini & Handayani, 2009) umumnya perempuan memutuskan bekerja hanya untuk membantu kehidupan ekonomi keluarga dan umumnya bekerja di sektor informal. Karena pendapatan rumah tangga yang rendah dengan jumlah tanggungan keluarga cukup banyak, dan suami tidak bekerja menjadi motivasi perempuan untuk bekerja. Sehingga dengan perempuan bekerja diharapkan akan membuat perubahan bagi kehidupan ekonomi rumah tangganya.

D. Teori Perceraian

Menurut (Dariyo, 2004) perceraian merupakan sebuah kondisi perpisahan yang terjadi antara pasangan suami dan istri yang disebabkan karena prinsip yang berbeda sehingga tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan rumah tangga. Yang mana pasangan suami dan istri tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendak sendiri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga. Hal tersebut diperkuat oleh Sayyid Sabiq dalam (Imron, 2016) mengatakan bahwa perceraian diambil sebagai jalan alternatif terakhir dalam permasalahan yang dihadapi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode data panel dan model *Fixed-Effect* serta diuji asumsi klasik yang meliputi uji t-statistik, multikolinieritas dan uji heteroskedastis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas hidup, aktivitas di ranah publik, serta kemandirian ekonomi perempuan terhadap angka perceraian di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan runtut waktu (*time series*) dalam bentuk data tahunan dari tahun 2012-2018. Data yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup perempuan ialah Indeks Pembangunan Gender (IPG), aktivitas di ranah publik ialah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), serta Kemandirian ekonomi ialah Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP).

Hasil penelitian ini disajikan dalam Gambar 1.

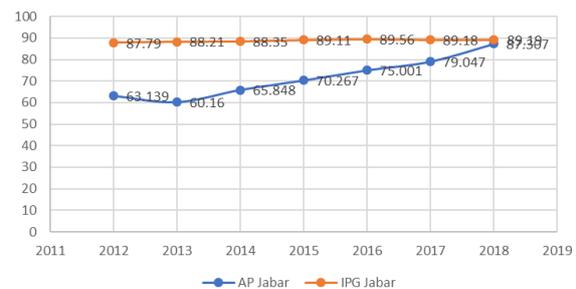
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
_JABAR--IPG_JABAR	-12.94101	6.115537	-2.116088	0.0634
_JATENG--IPG_JATENG	-9.658211	9.803107	-0.985219	0.3503
_JATIM--IPG_JATIM	-1.821078	4.783935	-0.380665	0.7123
_JABAR--IDG_JABAR	4.082971	1.979490	2.062638	0.0692
_JATENG--IDG_JATENG	0.063380	2.016837	0.031425	0.9756
_JATIM--IDG_JATIM	-1.957418	1.668190	-1.173379	0.2708
_JABAR--SPP_JABAR	18.32906	4.670963	3.924044	0.0035
_JATENG--SPP_JATENG	4.288117	4.970884	0.862647	0.4107
_JATIM--SPP_JATIM	-0.701701	3.196035	-0.219554	0.8311

Gambar 1. Hasil Estimasi Model, Olah Data

E. Pengaruh Kualitas Hidup Perempuan terhadap Angka Perceraian.

Berdasarkan hasil estimasi. Kualitas hidup perempuan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap angka perceraian di Jawa Barat, sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan kualitas hidup perempuan tidak berpengaruh terhadap angka perceraian.

Kualitas hidup perempuan dapat dilihat dari capaian rasio IPM perempuan dan IPM laki-laki, yakni ukuran Indeks Pembangunan Gender. IPG melihat kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

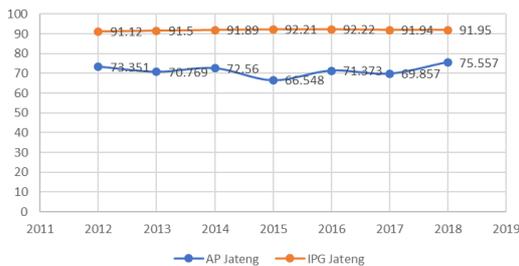


Gambar 2. Hubungan Indeks Pembangunan Gender dan Angka Perceraian di Jawa Barat, 2012-2018, Badan Pusat Statistika.

Hal yang menjadi penyebab kualitas hidup perempuan di Jawa Barat berpengaruh terhadap angka perceraian yakni; dilihat dari Gambar 1 hubungan antara IPG dan angka perceraian di Jawa Barat memiliki keterkaitan dimana ketika IPG meningkat, maka angka perceraian di Jawa Barat ikut meningkat. Hal tersebut dikarenakan komponen pembentuk IPM yaitu kualitas kesehatan dan pendidikan perempuan di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan kualitas kesehatan dan pendidikan laki-laki. Hal tersebut dapat terlihat pada capaian IPG Jawa Barat pada tahun 2018 sebesar 89.19 persen yang mana angka tersebut hampir mendekati 100, yang berarti bahwa perempuan di Jawa Barat memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam hal pembangunan dan perempuan di Jawa barat memiliki hak suara dalam menentukan keputusannya baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarganya. Sehingga apabila perempuan di Jawa Barat mendapat perlakuan yang tidak adil dalam rumah tangganya maka, ia dapat menentukan keputusan yang akan ia ambil. Hal tersebut sejalan dengan penelitian

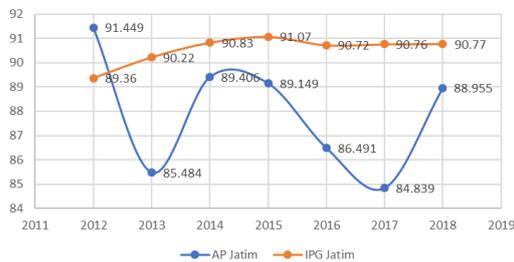
(Ulfah, 2011) bahwasanya perubahan tren perceraian disebabkan adanya perubahan posisi perempuan yang menjadi subjek perceraian besar kemungkinan disebabkan adanya akses sosial ekonomi yang didapatkan oleh perempuan, serta kemandirian perempuan dalam ekonomi diasumsikan menjadi pemicu perempuan dalam mengambil keputusan untuk bercerai.

Berbeda dengan Jawa Barat, kasus di Jawa Tengah dan Jawa Timur mengatakan sebaliknya bahwa kualitas hidup perempuan tidak berpengaruh terhadap angka perceraian. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Gambar 2 bahwasanya hubungan antara IPG dan angka perceraian di Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang berlawanan berarti bahwa tidak memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Meskipun angka IPG di Jawa Tengah telah mencapai angka 91.95 persen lebih tinggi daripada Jawa Barat tetapi hal tersebut tidak menjadi penyebab atau alasan tingginya angka perceraian di Jawa Tengah.



Gambar 3. Hubungan Indeks Pembangunan Gender dan Angka Perceraian di Jawa Tengah, 2012-2018, Badan Pusat Statistika.

Sama halnya dengan Jawa Tengah, hubungan antara IPG dan angka perceraian di Jawa Timur bertolak belakang ketika IPG di Jawa Timur rendah maka angka perceraian meningkat, dan begitupun sebaliknya ketika IPG di Jawa Timur meningkat, maka angka perceraian cenderung menurun.



Gambar 4. Hubungan Indeks Pembangunan Gender dan Angka Perceraian di Jawa Timur, 2012-2018, Badan Pusat Statistika.

Tidak berpengaruhnya kualitas hidup perempuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur terhadap angka perceraian. Dikarenakan masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur masih kental dengan budaya Jawa yang mana budaya Jawa memosisikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki dan istilah tersebut sudah

tertanam dalam masyarakat Jawa. Sehingga perempuan Jawa dicitrakan sebagai perempuan yang lemah lembut, penurut, tenang, tidak menyukai konflik dan mementingkan keharmonisan. Dengan demikian meskipun kualitas hidup perempuan semakin merata dengan adanya persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, hal tersebut bukanlah penyebab dari tingginya angka perceraian di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

F. Pengaruh Aktivitas Perempuan di Ranah Publik

Hasil estimasi menunjukkan bahwa aktivitas perempuan di ranah publik berpengaruh signifikan terhadap angka perceraian di Jawa Barat, sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak berpengaruh terhadap angka perceraian.

Aktivitas perempuan di ranah publik dapat dilihat berdasarkan data indeks pemberdayaan gender yang melihat keterlibatan perempuan dalam parlemen serta perempuan sebagai tenaga kerja. berdasarkan Tabel 2 partisipasi perempuan di Jawa Barat dalam sektor formal maupun sektor informal tidak berbeda jauh. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan di Jawa Barat aktif dalam ranah publik.

TABEL 2. PARTISIPASI PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK, 2018

Partisipasi perempuan	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
Sektor Formal	48.13	36.49	32.52
Sektor Informal	51.87	63.51	67.48
IDG	70.02	74.03	69.71

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah 2020

Hal yang menjadi pengaruh aktivitas perempuan di ranah publik terhadap angka perceraian di Jawa Barat yaitu; ketika seorang perempuan yang sudah menikah masuk ke dunia kerja beraktifitas dalam ranah publik maka ia memiliki sebuah peran baru yaitu, sebagai ibu bekerja dan juga sebagai ibu rumah tangga atau disebut dengan peran ganda. Adanya peran ganda maka berarti jam kerja domestik perempuan tidak berkurang ditengah kelelahannya beraktifitas di ranah publik sehingga dapat menimbulkan kelonggaran ikatan keluarga yang akan menciptakan jarak antara perempuan dan keluarganya sehingga komunikasi antar anggota keluarga tidak berjalan dengan baik dan seringkali menimbulkan persepsi yang salah mengenai lawan bicaranya dan menimbulkan konflik kelua

Berbeda dengan Jawa Barat, aktivitas perempuan di ranah publik tidak berpengaruh

terhadap angka perceraian di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada Tabel 3 dapat dilihat perempuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur cenderung bekerja di sektor informal, yang mana seperti kita ketahui bahwa sektor informal memiliki waktu bekerja yang fleksibel, maka apabila perempuan banyak bekerja di sektor informal mereka dapat membagi waktu antara pekerjaannya dengan waktu keluarga. Sehingga komunikasi antar keluarga dapat terjalin dengan baik dan peran ganda yang dimiliki oleh perempuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak menjadi masalah, sebab dalam budaya Jawa perempuan dianggap sebagai *kanca wingking* (teman belakang) yang mana perempuan memiliki tugas utama dalam mengelola urusan rumah tangganya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Lianawati, 2008) menurutnya perempuan Jawa tidak terlalu masuk ke dalam sektor formal karena secara normatifnya perempuan Jawa tidak boleh melebihi suami. Walaupun kesempatan untuk masuk ke sektor formal tersebut ada, namun perempuan Jawa diharapkan tidak menggunakan kesempatan tersebut apabila hal itu dapat mengganggu harmonisnya keluarga.

G. Pengaruh Kemandirian Ekonomi Perempuan terhadap Angka Perceraian

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel kemandirian ekonomi perempuan berpengaruh terhadap angka perceraian di Jawa Barat, namun di Jawa Tengah dan Jawa Timur hasil estimasi kemandirian ekonomi perempuan tidak berpengaruh terhadap angka perceraian.

Keputusan seorang perempuan yang sudah menikah untuk masuk ke dalam dunia kerja melibatkan peran keluarga sebagai unit pengambilan keputusan. Perempuan yang bekerja ia menghasilkan pendapatan yang dapat membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga dengan kemandirian ekonomi perempuan dapat berkontribusi dalam memperbaiki status ekonomi keluarga.

TABEL 3. PENDAPATAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI, 2018

Provinsi	Rata-rata Upah		SPP
	P	L	
Jawa Barat	2,839,054	3,372,108	29.51
Jawa Tengah	1,791,221	2,410,735	34.28
Jawa Timur	1,981,946	2,634,797	25.64

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah 2020

Berdasarkan Tabel 3 masih terdapat kesenjangan upah perempuan dan laki-laki di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun,

upah perempuan di Jawa Barat menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan upah perempuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Jawa Barat dapat menghasilkan pendapatan walaupun pendapatan perempuan masih di bawah laki-laki, sumbangan pendapatan perempuan di Jawa Barat mencapai angka 29.51 persen yang mana dengan penghasilan pendapatan sebesar 2 839 054 perempuan di Jawa Barat dapat berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangganya dan secara ekonomi perempuan di Jawa Barat memiliki kemandirian ekonomi sehingga ia bisa menghidupi keluarganya dari hasil kerja keras mereka.

TABEL 4. FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN, 2018

Faktor Perceraian	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
KDRT	1,459	402	1,455
Faktor Ekonomi	36,701	21,908	32,105
Perselisihan	29,208	28,527	38,109
Meninggalkan salah satu pihak	12,341	19,765	12,595

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah 2020

Tabel 4 menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya angka perceraian disumbang dari faktor KDRT, Ekonomi finansial, Perselisihan, dan meninggalkan salah satu pihak. Di Jawa Barat faktor ekonomi mendominasi penyebab perceraian tertinggi mencapai 36 701 kasus. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa perempuan di Jawa Barat memberikan kontribusi terhadap rumah tangganya sehingga perempuan di Jawa Barat mandiri secara ekonomi. Ketika perempuan di Jawa Barat semakin mandiri ia berani untuk membuat keputusan apabila suami tidak ikut berkontribusi dalam penciptaan pendapatan rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Sari & dkk, 2016) yang dilakukan di Kota Bandung bahwasanya perceraian seringkali terjadi pada rumah tangga yang berpendapatan rendah. Dimana Ketika penghasilan rendah maka, akan menimbulkan permasalahan dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. sehingga harapan hidup yang lebih baik tidak dapat tercapai.

Berbeda dengan kasus di Jawa Barat, kemandirian ekonomi perempuan tidak berpengaruh terhadap angka perceraian di Jawa Tengah dan Jawa Timur, meskipun sama halnya dengan Jawa Barat bahwa perempuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat berkontribusi

terhadap pendapatan rumah tangga tetapi dilihat dari faktor perceraian tertinggi di Jawa Tengah dan Jawa Timur bukanlah faktor ekonomi saja namun, faktor perselisihan mendorong angka perceraian naik hingga 28,527 kasus di Jawa Tengah dan 38,109 kasus di Jawa Timur.

IV. KESIMPULAN

Pengaruh kualitas hidup, aktivitas di ranah publik, serta kemandirian ekonomi perempuan berpengaruh signifikan di Jawa Barat, tetapi tidak berpengaruh signifikan di Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hal yang mendorong perempuan di Jawa Barat memutuskan untuk menggugat cerai dikarenakan adanya perubahan tren perceraian karena perempuan memiliki akses sosial ekonomi yang sama dengan laki-laki sehingga menjadikan perempuan dapat mengambil keputusan bercerai apabila mereka tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur kualitas hidup, aktivitas di ranah publik, serta kemandirian ekonomi perempuan tidak berpengaruh terhadap angka perceraian disebabkan adanya faktor budaya yang masih kental di dalam masyarakat yang mana perempuan Jawa dicitrakan sebagai perempuan yang lemah lembut dan patuh terhadap suaminya. Meskipun perempuan Jawa memiliki akses yang sama dengan laki-laki namun perempuan Jawa tidak boleh melebihi laki-laki karena perempuan Jawa melekat dengan istilah *kanca wingking* atau teman belakang yang mana memiliki tugas mengurus rumah tangga.

V. SARAN

Peran perempuan dalam sebuah pembangunan memang sangat penting, untuk itu kesetaraan akses bagi perempuan dalam berbagai bidang harus ditingkatkan. Kebijakan yang dapat pemerintah daerah lakukan untuk menurunkan angka perceraian yaitu dengan memberikan program-program untuk mendorong pemberdayaan perempuan agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan aktifnya perempuan di ranah publik.

Perempuan yang aktif bekerja dan juga berkontribusi dalam penciptaan pendapatan harus bisa menyeimbangkan peran antara ibu bekerja dengan ibu rumah tangga. Serta menjaga komunikasi antar anggota keluarga, agar keharmonisan rumah tangga tetap terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arfida. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [2] Artini, N. W., & Handayani. (2009). Kontribusi Pendapatan Ibu Rumah Tangga Pembuat Makanan

- Olahan Terhadap Pendapatan Keluarga. *Piramida*.
- [3] Dariyo, A. (2004). Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi Vol.2 No.2*.
 - [4] Doriza, S. (2015). *Ekonomi Keluarga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
 - [5] Dreze, J., & Sen, A. (1999). *The Amartya Sen and Jean Dreze Omnibus: (Comprising) Poverty and Famines: Economic Development and Social Opportunity Oxford University Press*. Oxford University Press.
 - [6] Galistya, T. M. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perceraian Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan. *Dinamika Sosial Budaya*, 21.
 - [7] Hubeis, A. V. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press.
 - [8] Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *Buana Gender*.
 - [9] Julia, A. (2018). *Ekonomi Kependudukan dan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung.
 - [10] Lianawati, E. (2008). *Perempuan Jawa, Konco Wingking atau Sigaraning Nyawa*. Retrieved from Psikologi Feminis: <https://www.google.com/amp/s/esterlianawati.wordpress.com/2008/04/09/perempuan-jawa-konco-wingking-atau-sigaraning-nyawa/amp/>
 - [11] Naibaho, B., & Sihotang, M. R. (2011). Kontribusi Istri Bekerja Dalam Menambah Pendapatan Keluarga, Motivasi dan Persepsinya Terhadap Pekerjaannya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Tinggi Vol.4, 4*(No.1). Retrieved from https://akademik.uhn.ac.id/portal/public_html/JURNAL/JURNAL_BENIKA_NAIBAHO_PDF/Kontribusi_pendapatan_istri.pdf
 - [12] Sari, Y., & dkk. (2016). The Risk of Divorces: style of communication, stages of family development, and type of socioeconomic status. *International Journal Of Culture and History*, Vo. 2(No.1).
 - [13] Simanjuntak, P. J. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
 - [14] Suratiyah, K., & et al. (1996). *Dilema Wanita Industri Rumah Tangga dan Aktivitas Domestik*. Yogyakarta: Aditya Media.
 - [15] Ulfah, I. (2011). Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo. *Kodifikasia*, Vol.5(No.1)
 - [16]

